



AKUNTABILITAS SPIRITUAL SEBAGAI LANDASAN FUNDAMENTAL MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DESA: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI

Oleh

Andini Nurhajrah¹⁾, Arif Widyatama²⁾, Margaretha EJ Wagey³⁾

^{1,2,3}STIE Panca Bhakti Palu

Email: arifwidyatama@stiepbpalu.ac.id

Abstract

This study aims to understand the phenomenon of accountability in the ABC Village of DEF Regency. Accountability is a fundamental concept to be a reference for village governments in carrying out village operations. The research method used is qualitative, using a phenomenological approach. This study interviewed research informants. The first informant was the ABC village government apparatus and the community who felt the impact of accountability carried out by the village government apparatus. One of the obstacles faced by the Village Government apparatus is the competence of the Village Government apparatus in preparing financial reports. At this stage is the stage where the basic structure or fundamental level of character formation of the Village Government apparatus so that the spiritual values so that in reporting Village finances so there is no pressure in reporting financial reports so when reporting Village finances there is a sense of sincerity because in reporting Village finances so that the form accountability to the public is based on feeling because the public needs the financial statements.

Keywords: Accountability, government, spiritual, financial statements, village government, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Adopsi sentralisasi diperhadapkan dengan kompleksnya masalah perubahan dan kecenderungan global yang dihadapi, semakin membebani dalam penentuan kebijakan-kebijakan domestik. Ini disebabkan untuk waktu yang cukup lama, pemerintah provinsi telah menggunakan terlalu banyak waktu dan energinya untuk mengurus masalah-masalah yang sebenarnya sudah bisa diurus oleh pemerintahan desa.

Penerapan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Namun ada permasalahan baru ketika pertanggungjawaban desa yang dituntut menghasilkan laporan yang akuntabel tidak diimbangi dengan kesiapan aparatur desa dan

masyarakat dalam menyikapi proses akuntabilitas tersebut. Ketidakakuntabelan tersebut bisa diakibatkan karena budaya masyarakat yang tidak diadopsi dalam sistem akuntabilitas. Model akuntabilitas yang berbasis pada kearifan lokal tentunya akan sangat berterima umum di masyarakat setempat dan mudah diaplikasikan. Masyarakat osing yang egaliter lebih mengutamakan kebersamaan. Untuk melakukan pembangunan desa, diperlukan sebuah perencanaan strategis agar pembangunan desa dalam masyarakat osing menjadi berkembang. Metode yang tepat dalam melakukan perencanaan dalam masyarakat osing adalah metode partisipatif planning. Terkait penganggaran, masyarakat desa masih menggunakan pola line item budgeting, namun untuk performance budgeting masih sangat memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat osing. Panutan dari tokoh masyarakat dan aparat desa sangat membantu proses pelaksanaan kegiatan yang



ada di desa. Oleh karena itu, untuk memulai setiap kegiatan hendaknya tokoh masyarakat atau aparatur desa harus mensosialisasikan terlebih dahulu di masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini akan mempermudah dalam pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan,. Sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. Cheng, *et al* (2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Lebih lanjut, Kalbers dan Forgyaty (1995) menambahkan selain adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi publik. Kurtz dan Schrank (2007) juga memberikan argumennya yang menyebutkan bahwa faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintahan adalah implementasi *Good Government Governance*. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dalam dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Ditambahkan oleh Uddin dan Hopper (2001) bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran Desa) output yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Pengamatan peneliti di lapangan khususnya di pemerintah Desa tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah. Hal ini

didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF) tahun 2010 yang menyebutkan potensi-potensi penyalahgunaan dana Desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa dan sistem pengendalian intern. Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing. Sebagai informasi, data yang diperoleh dari IACF (2010) menyebutkan bahwa kabupaten Belitang Timur memperoleh alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 sebesar 1 miliar. Namun sama halnya dengan pemerintah lainnya, secara umum pemerintah Desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD. Di Kabupaten DEF misalnya, berdasarkan pengamatan peneliti pengetahuan masyarakat terutama pemerintah Desa di daerah tersebut masih minim dalam mengelola dana keuangan desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum mampu mengelola dana tersebut. Selain di Kabupaten DEF, di Kabupaten lain misalnya di Kabupaten Donggala pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah *asymmetry information* yang terjadi atas laporan keuangan di publikasikan kepada publik. Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis yaitu memberikan sebuah kebaruan di bidang ilmu akuntansi terutama



akuntansi sector publik, karena membangun model akuntabilitas berbasis kearifan lokal. penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam hal ini desa ABC dalam membuat sebuah model akuntabilitas berbasis kearifan lokal.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Konsep mengenai akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan baik terhadap entitas swasta maupun publik. Boven (2006) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dan masyarakat/forum. Pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat/forum terkait keadaan yang sebenarnya terjadi di organisasi. Hal ini penting mengingat publik, selaku prinsipal perlu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat/publik. Lebih lanjut, Oyehinde (2010) menambahkan bahwa bahwa tingkat akuntabilitas akan sangat memengaruhi kepuasan/*satisfaction* dari publik, sehingga peran dari *agent* (pihak pengelola) menjadi penting agar tingkat akuntabilitas publik menjadi berhasil.

Penelitian ini menggunakan *accounting framework* yang dikembangkan oleh Oyehinde (2010) untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas publik. Pada model ini membahas mengenai beberapa jalur yang dapat memengaruhi akuntabilitas. Model ini terbagi atas beberapa tahapan akuntabilitas dalam mengimplementasikan sebuah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan tahap-tahap *accountability framework*:

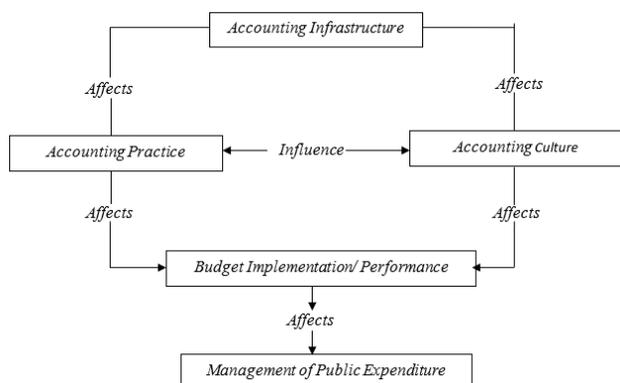
1. *Accounting Infrastructure*: Ini merupakan tahapan dimana struktur untuk mendukung sistem akuntansi di suatu organisasi harus kuat. Ketika struktur yang dimiliki lemah maka akan membuat tingkat akuntabilitas semakin lemah. Sehingga nantinya lemah/kuat

tahapannya ini akan sangat memengaruhi tahapan lainnya.

2. *Accounting Practice*: Ini merupakan tahapan dimana sistem akuntansi harus bekerja seperti yang seharusnya. Pada tahapan ini sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *accounting infrastructure*.
3. *Accounting Culture*: Ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan budaya yang terjadi di suatu organisasi. Budaya ini sangat memengaruhi perilaku individu maupun kelompok suatu organisasi bekerja. Pada tahapan Pada tahapan ini juga sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *accounting infrastructure*. Terjadi sebuah hubungan antara *accounting Practice* dan *accounting culture*. Hubungan ini terjadi dikarenakan praktik akuntansi tidak hanya dapat memengaruhi hasil namun juga dapat memengaruhi perilaku suatu organisasi/budaya. Dan sebaliknya budaya akuntansi dalam suatu organisasi dapat memengaruhi praktik akuntansi.
4. *Budget Implementation/Performance*: Ini merupakan tahapan yang berkaitan mengenai implementasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengacu pada UU Nomor 24 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat anggaran dan melaksanakannya. Sehingga peran *accountability infrastructure*, serta *accounting practice* dan *accounting culture* akan sangat memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
5. *Management of Public Expenditure*: Ini merupakan tahapan kebijakan yang dihasilkan untuk kepentingan publik. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir yang akan mengacu dari implementasi akuntabilitas yang telah diterapkan sebelumnya. Untuk lebih



jelasan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Accountability Framework (Iyoha dan Oyerinde, 2009)

Budaya

Budaya (*culture*) merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok *sosial yang lain*. Istilah *the collective mental programming* atau *software of mind* digunakan untuk menyebutkan keseluruhan pola dalam kajian budaya. *Mental proram*s atau budaya suatu kelompok terbentuk oleh lingkungan sosial, (seperti negara, daerah, tempat kerja, sekolah dan rumah tangga) dan kejadian-kejadian yang dialami dalam kehidupan para anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian proses terbentuknya pola pikir, perasaan dan perbuatan tersebut dianalogikan dengan proses penyusunan program dalam komputer.

Hofstede, dkk (2010) mendefinisikan dan mengukur budaya dengan merujuk pada *collective programming of mind* yang diwujudkan melalui *myths, ritual, habits, dan belief* tentang realitas. Kemudian untuk pembagian nilai oleh anggota suatu kelompok begitu penting karena didalam definisi budaya, nilai merupakan atribut dari karakteristik individual yang cenderung untuk lebih menyukai pernyataan tertentu atas keperluan/urusan dengan lainnya.

Menurut Hofstede, dkk (2010) system nilai budaya merupakan refleksi dalam empat bagian dimensi, yaitu: *Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism* dan

Masculinity. Cara melihat masalah organisasi dari perspektif budaya adalah sebagai suatu elemen yang sangat diperlukan untuk analisis organisasional dimana melalui budaya, individual diintegrasikan kedalam unit sosial, seperti keluarga, klub dan asosiasi, perusahaan, region, atau bangsa, nilai dan norma internal maupun unit sosial dalam kepribadian cenderung stabil sehingga perilakunya dapat diprediksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literature atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2004: 3)

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai bagaimana individu dari setiap aparatur pemerintah desa mamahami dari implementasi akuntabilitas serta melihat fungsi atau esensi dari akuntabilitas itu sendiri dari kearifan lokal. Informasi digali secara dalam dengan menggunakan wawancara terhadap aparatur pemerintah desa, serta pihak yang terlibat dalam melihat akuntabilitas dari otonomi pemerintah desa.

Karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif ini mementingkan makna, konteks, dan perspektif ernik, proses penelitian lebih berbentuk siklus dan proses. Proses pengumpulan data berlangsung secara simultan dan lebih mementingkan kedalaman daripada keluasan cakupan penelitian. Dengan demikian peneliti ini akan lebih terfokus kepada dunia pemaknaan tentang apa yang terjadi mengenai akuntabilitas tersebut.



Metode kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini karena metode ini lebih digunakan untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif, memberikan tekanan terbuka tentang kehidupan social, khususnya tentang perilaku aparatur pemerintah desa mengenai akuntabilitas. Apakah aparatur pemerintah memahami mengenai esensi dari akuntabilitas? Bagaimana akuntabilitas bila dipandang dari sisi kearifan lokal? Atau mungkin tidak memahami apa yang sebenarnya yang mereka buat selama ini?

Fenomenologi sebagai metode Penjelajahan Realitas

Menurut peneliti dengan mempertimbangkan kajian psikologi sebagai bidang kajian yang menyangkut dimensi kemanusiaan yang dimana dimensi ini adalah dimensi subjektif maka paradigm yang tepat adalah paradigm Interpretif. Paradigma Interpretif, yang dalam banyak hal juga disebut sebagai paradigm konstruktif menekankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memahami realitas dunia apa adanya (Ludigdo, 2005:52). Oleh karena itu menurut paradigm interpretif, penelitian yang merupakan bangunan dasar dari sebuah proses konstruksi ilmu pengetahuan adalah dasar untuk menjelaskan kehidupan dan kejadian sosial dan memahami manusia melalui suatu *common sense* yang mengandung makna atau sistem makna yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memaknai kehidupan mereka. Jadi, ilmu pengetahuan menurut paradigm interpretif buka digunakan untuk menjelaskan maupun memprediksi akan tetapi lebih bagaimana untuk memahami sebuah realita yang ada (*to understand*).

Maka berangkat dari penjelasan di atas, maka sebagai salah satu aliran pemikiran sekaligus metodologi dalam paradigma Interpretif ini (Burrell and Morgan, 197:235) peneliti memilih fenomenologi sebagai metode pemahaman akan realitas dengan dimensi subjektif dalam penelitian ini. Harapan peneliti dengan fenomenologi peneliti dapat memahami bagaimana makna dan simbol dari satu

pemahaman para pelaku realitas dan bagaimana mereka mengimplementasikan suatu praktik akuntansi yang apabila suatu standar di dunia ini berubah.

Dengan rerangka berfikir seperti di atas, fenomenologi merupakan salah satu aliran dalam paradigm interpretif. Moleong (1998: 37) menyatakan yang ditekankan oleh kaum fenomenologis adalah aspek subjektif dari perilaku orang. Pada filosof transcendental, Hüssel dalam Burrell dan Morgan (1994) yang juga dikutip dalam Chayaningsih (2005) berusaha memahami dunia sebagai fenomena atau perwujudan, memahaminya bukan sebagai subjek tetapi sebagai arti murni. Sehingga dalam aliran fenomenologi transcendental peneliti masuk ke dalam subjek untuk memahami dengan memaknai segala perkataan dan tindakannya. Sejalan dengan Schutz, Burrell dan Morgan (1994) juga dikutip dalam Cahyaningsih (205) yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan sosiologi dalam suatu analisis pada kejadian sehari-hari, penelitian ini juga mengkaitakna apa yang diamati di lapangan dengan berbagai konsep sosiologi dan psikologi yang dihadapi oleh UMKM terhadap perubahan standar akuntansi tersebut.

Situs Penelitian

Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Aparatur Pemerintah Desa yang berada di desa ABC Kecamatan XYZ Kabupaten DEF Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk Kriteria. Pertimbangan peneliti mengambil Desa ABC sebagai situs penelitian dikarenakan Desa ABC merupakan salah satu desa binaan dari STIE Panca Bhakti Palu sehingga dampak dari akuntabilitas yang telah dilakukan melalui proses penyusunan laporan keuangan desa dapat terlihat. Selain itu, terdapat beberapa kearifan lokal yang menjadi ketertarikan peneliti melalui observasi awal yang telah dilakukan.

3.4 Informan Kunci

Informan yang pertama adalah aparatur pemerintah desa ABC serta masyarakat yang merasakan dampak dari akuntabilitas yang



telah dilakukan oleh aparat pemerintah Desa. Selain itu, dalam beberapa pertimbangan peneliti menggunakan kalangan masyarakat dikarenakan kalangan masyarakat ada beberapa hal yang ingin ditelaah mengenai kearifan lokal yang dimiliki oleh kalangan masyarakat di Desa ABC. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. Teknik penyampelan ini dianggap tepat dikarenakan peneliti akan menkonfirmasi beberapa pihak yang kiranya memahami benar mengenai esensi dari akuntabilitas serta kaitannya dengan kearifan lokal yang terjadi di Desa ABC. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi, ucapan yang selanjutnya dianalisa untuk dijadikan bukti-bukti guna mendukung kebenaran dalam pengungkapan suatu pandangan mengenai alasan interpretasi obyek terhadap fenomena.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:

a. Survei pendahuluan

Berupa menggali informasi-informasi *up-to date* baik melalui artikel, internet, media cetak, dan lainnya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi di Desa ABC dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

b. Survei kepustakaan

Berupa kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan teori-teori yang mendukung.

c. Pengumpulan data lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, rekaman dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, dalam observasi tersebut peneliti melakukan wawancara secara mendalam guna memperoleh informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat perekam untuk

mempermudah proses pengumpulan data. Dan sebagai tambahan informasi/data diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi yang mendukung penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai note untuk memudahkan dalam analisa selanjutnya.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data pada pendekatan fenomenologi (Creswell, 2007), yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan *horizontalizing* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif dihilangkan sehingga yang tersisa hanya *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau pembentuk dari *phenomenon* yang tidak mengalami penyimpangan).
4. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan



makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut.

7. Membuat laporan pengalaman setiap informan, setelah itu membuat tulisan gabungan dari gambaran-gambaran tersebut.

Pembahasan

Akuntabilitas Pemerintah Desa ABC Kecamatan XYZ Kabupaten DEF

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh dari sebuah hasil wawancara dengan aparatur Pemerintah Desa bahwa terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai akuntabilitas Pemerintah Desa ABC yaitu Pemerintah Desa dalam hal melaporkan laporan keuangan Desa baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) sudah dilakukan dengan baik. Indikator hingga pelaporan keuangan atau akuntabilitas public Pemerintah Desa ABC Kabupaten DEF adalah adanya bentuk laporan keuangan desa yang sudah sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah yaitu Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa Wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa yang dilampiri dengan
 1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan
3. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menimbulkan sebuah hasil bahwa tingkatan akuntabilitas di Desa ABC memiliki banyak tingkatan. Pada aspek Pemerintah Desa ABC menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan mengacu pada Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaporan kepada Publik atau masyarakat sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Pemerintah.

Banyak factor yang menyebabkan Pemerintah Desa menjadi lebih termotivasi untuk dapat melakukan bentuk akuntabilitas laporan kepada public tapi diantaranya yang paling kuat adalah sebuah kecemasan atau rasa takut pada pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal Pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikunjungi kediaman Kepala Desa ABC disebutkan bahwa:



“Pada dasarnya Kami sebagai pemerintah desa sudah mencoba patuh agar dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, yang kami khawatirkan jangan sampai uang yang kami pegang itu membuat kami juga harus terjerat hukum”

Berdasarkan dari pernyataan di atas, bahwa ada sebuah ketakutan dari Pemerintah bahwa segala yang diupayakan dari Pemerintah Desa justru menimbulkan kesalahan sehingga Pemerintah Desa harus mendapatkan sebuah sanksi atas kelalaian mereka dalam hal pembuatan laporan keuangan Desa sehingga ada sebuah kesan keterpaksaan yang ditimbulkan dari pembuatan laporan keuangan Desa. Akibat dari bentuk keterpaksaan ini menimbulkan sebuah hal yang berbeda dalam hal akuntabilitas public ketimbang jika suatu bentuk pelaporan yang seharusnya memang dilaporkan kepada public agar public mengetahui dengan tepat hasil kinerja dari Pemerintah Desa setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan hasil wawancara terhadap aparatur pemerintah Desa ditemukan bahwa pada dasarnya dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mengalami kendala dikarenakan kompetensi yang dimiliki Pemerintah Desa dalam membuat laporan keuangan tersebut tidak sesuai bidang keilmuan. Oleh sebab itu, walaupun seperti yang disebutkan diawal bahwa Pemerintah Desa telah membuat pelaporan keuangan desa atau dengan kata lain memenuhi aspek akuntabilitas namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai aspek hulu dari pembuatan laporan keuangan yang cenderung memiliki kelemahan dalam aspek fundamental sehingga jika mengacu pada aspek hilir akuntabilitas pelaporan keuangan sudah terpenuhi namun jika

bercermin pada aspek hulu masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.

Jika mengacu pada desain model akuntabilitas (*accountability framework*) Penelitian yang dilakukan oleh Iyoha dan Oyerinde (2009) maka dapat diuraikan sebagai berikut: pada dasarnya model akuntabilitas yang diajukan oleh Iyoha dan Oyerinde (2009) menggunakan 3 tahap yaitu:

a. *Accountability Infrastructure,*

Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana harus ada struktur untuk mendukung sistem akuntansi disuatu organisasi yang kuat. Ketika struktur yang dimiliki lemah maka akan membuat tingkat akuntabilitas semakin lemah. Sehingga nantinya lemah / kuat tahapan ini akan sangat mempengaruhi tahapan lainnya. Penerapan Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan menggunakan *Accountability Infrastructure* untuk level penerapannya masih lemah di lihat dari faktor kompetensi yang terhadap akuntabilitas. Tahapan ini menurut Iyoha dan Oyerinde (2009) merupakan sebuah tahapan dasar untuk bisa mencapai hilir dari proses akuntabilitas. Bila mengacu pada hasil penelitian di atas maka dapat dikatakan pada aspek ini Pemerintah Desa ABC masih lemah sehingga perlu pembinaan terkait peningkatan kompetensi atau strategi-strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dari aparatur Pemerintah Desa.

b. *Accounting Practice,*

Tahapan ini merupakan tahapan dimana sistem akuntansi harus bekerja seperti seharusnya. Pada tahapan ini sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *Accounting Infrastructure*. Berdasarkan hasil



wawancara yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh hasil bahwa kompetensi aparatur Pemerintah Desa masih sangat lemah sehingga dalam pelaksanaannya maka dapat menyebabkan pelaksanaan dari proses akuntansi akan melemah. Jika hal ini melemah maka serta merta akan membuat sebuah tatanan budaya akuntansi yang tercipta yang melemah. Pada tahap ini merupakan sebuah tahapan praktik sehingga keberhasilan dari sistem praktik akuntansi di Pemerintah Desa sangat bergantung pada aspek fundamental dari akuntabilitas.

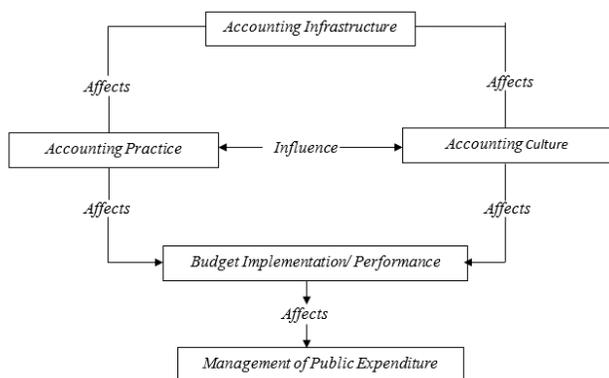
c. Accounting Culture,

Tahapan ini merupakan sebuah tahapan terakhir dari proses akuntabilitas sebelum masuk pada aspek implementasi. Tahapan ini merupakan sebuah tahapan akuntabilitas ketika akuntabilitas menjadi sebuah aspek budaya. *Accounting Culture* merupakan sebuah tahapan ketika akuntabilitas bukan hanya menjadi sebuah kewajiban tapi akuntabilitas menjadi sebuah kebutuhan serta menjadi konsep yang harus mengakar pada aparatur Pemerintah Desa sehingga dalam proses akuntabilitas, pelaporan keuangan tidak hanya menjadi sebuah dasar untuk menghilangkan rasa takut akan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal yakni BPKP atau BPK. Namun, tahapan ini sangat bergantung pada kedua proses sebelumnya yaitu *accounting infrastructure* dan *accounting practice*. Jika pada tahapan sebelumnya memiliki pondasi dasar yang tidak kuat maka tidak mungkin pada tahapan *accounting practice* dan *accounting culture* kerangka pemahaman akuntansi serta penerapannya menjadi tidak kuat. Bila

mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan pada aparatur Pemerintah Desa ABC, pada tahapan praktik akuntansi sudah sesuai dengan aturan atau dengan kata lain sudah memenuhi standar akuntansi Pemerintah, tapi ruh akuntabilitas atau pondasi akuntansi tidak dimiliki oleh aparatur Pemerintah Desa, sehingga dalam hal ini dapat berdampak pada proses perilaku individu maupun kelompok suatu organisasi bekerja. Pada tahapan ini sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *accounting infrastructure* dan *accounting practice*. Penerapan faktor kompetensi dan faktor sistem pengendalian internal dengan menggunakan *Accounting Culture* masih berada di level yang lemah. Hal ini dikarenakan perilaku kerja Pemerintah Desa yang mengelola ADD belum sesuai dengan yang diharapkan.

Model Akuntabilitas berbasis kearifan lokal

Pada bagian ini juga akan dikembangkan sebuah model akuntabilitas berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Model akuntabilitas ini awalnya merupakan model akuntabilitas yang telah dibuat oleh Iyoha dan Oyerinde (2009), penelitian ini mencoba untuk mengembangkan model tersebut namun didasarkan atas hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa. Pada awalnya model akuntabilitas yang telah dibuat oleh Iyoha dan Oyerinde (2009) adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Accountability Framework (Iyoha dan Oyerinde, 2009)

Penelitian ini menggunakan *accounting framework* yang dikembangkan oleh Iyoha dan Oyerinde (2010) untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas publik. Pada model ini membahas mengenai beberapa jalur yang dapat memengaruhi akuntabilitas. Model ini terbagi atas beberapa tahapan akuntabilitas dalam mengimplementasikan sebuah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan tahap-tahap *accountability framework*:

1. *Accounting Infrastructure*: Ini merupakan tahapan dimana struktur untuk mendukung sistem akuntansi di suatu organisasi harus kuat. Ketika struktur yang dimiliki lemah maka akan membuat tingkat akuntabilitas semakin lemah. Sehingga nantinya lemah/kuat tahapan ini akan sangat memengaruhi tahapan lainnya.
2. *Accounting Practice*: Ini merupakan tahapan dimana sistem akuntansi harus bekerja seperti yang seharusnya. Pada tahapan ini sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *accounting infrastructure*.
3. *Accounting Culture*: Ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan budaya yang terjadi di suatu organisasi. Budaya ini sangat memengaruhi perilaku individu maupun kelompok suatu organisasi bekerja. Pada tahapan Pada

tahapannya ini juga sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *accounting infrastructure*. Terjadi sebuah hubungan antara *accounting Practice* dan *accounting culture*. Hubungan ini terjadi dikarenakan praktik akuntansi tidak hanya dapat memengaruhi hasil namun juga dapat memengaruhi perilaku suatu organisasi/budaya. Dan sebaliknya budaya akuntansi dalam suatu organisasi dapat memengaruhi praktik akuntansi.

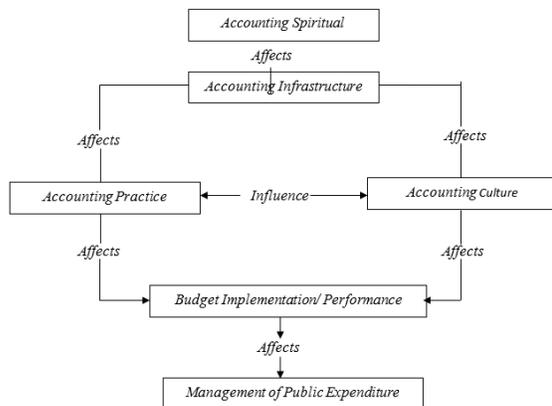
4. *Budget Implementation/Performance*: Ini merupakan tahapan yang berkaitan mengenai implementasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengacu pada UU Nomor 24 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat anggaran dan melaksanakannya. Sehingga peran *accountability infrastructure*, serta *accounting practice* dan *accounting culture* akan sangat memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
5. *Management of Public Expenditure*: Ini merupakan tahapan kebijakan yang dihasilkan untuk kepentingan publik. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir yang akan mengacu dari implementasi akuntabilitas yang telah diterapkan sebelumnya.

Konsep mengenai akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan baik terhadap entitas swasta maupun publik. Boven (2006) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dan masyarakat/forum. Pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat/forum terkait keadaan yang sebenarnya terjadi di organisasi. Hal ini penting mengingat publik, selaku prinsipal perlu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat/publik. Lebih lanjut, Iyoha dan Oyerinde (2010) menambahkan bahwa bahwa



tingkat akuntabilitas akan sangat memengaruhi kepuasan/*satisfaction* dari publik, sehingga peran dari *agent* (pihak pengelola) menjadi penting agar tingkat akuntabilitas publik menjadi berhasil.

Namun pada tahapan ini model akuntabilitas yang dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Accountability Framework (Widyatama, 2017)

Pada model di atas merupakan sebuah model pengembangan *accountability framework* terdapat penambahan atau pengembangan yaitu penambahan mengenai aspek *accounting spiritual*. Penambahan pada aspek ini didasarkan pada hasil temuan di lapangan yang menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam hal ini pelaporan keuangan hanya sebatas pemenuhan kewajiban sehingga pada penelitian ini akan ditambahkan aspek spiritual. Berbeda dengan penelitian lainnya pada penelitian ini menggunakan *grounded theory* untuk menemukan suatu fakta yang terjadi namun tidak membawa teori ke lapangan. Berdasarkan data tersebut diperoleh data bahwa tingkat kompetensi aparatur dalam pengelola Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) masih rendah sehingga keinginan dalam pengelolaan keuangan masih sebatas berupa paksaan akibatnya keinginan agar laporan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat desa masih belum memenuhi aspek bahwa laporan keuangan desa merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan agar masyarakat desa bisa

mengetahui perkembangan desa di setiap tahunnya.

Penambahan aspek spiritualisme dalam akuntabilitas publik dalam hal pelaporan keuangan desa merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar setiap aparatur Pemerintah Desa memiliki dasar atau fundamental yang kuat dalam hal ini nilai-nilai spiritual agar nantinya dalam menjalankan nilai-nilai akuntabilitas harus didasari dengan nilai spiritual agar bentuk pertanggungjawaban tidak hanya pada publik atau manusia tapi pertanggungjawaban juga harus memenuhi aspek nilai-nilai spiritual agar nantinya bentuk pertanggungjawaban juga bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sehingga pemerintah Aparatur Desa dengan benar melakukan pelaporan keuangan atau akuntabilitas keuangan Desa.

Bila diuraikan lebih dalam maka model akuntabilitas yang dikembangkan sebagai berikut:

1. *Accounting Spiritualisme*: Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana struktur dasar atau tataran fundamental pembentukan karakter dari aparatur Pemerintah Desa sehingga nilai-nilai spiritual agar dalam melaporkan keuangan Desa sehingga tidak ada tekanan dalam melaporkan laporan keuangan sehingga ketika melaporkan keuangan Desa ada rasa keikhlasan karena dalam melaporkan keuangan Desa sehingga bentuk pertanggungjawaban kepada publik didasarkan atas rasa karena publik membutuhkan laporan keuangan tersebut.
2. *Accounting Infrastructure*: Ini merupakan tahapan dimana struktur untuk mendukung sistem akuntansi di suatu organisasi harus kuat. Ketika struktur yang dimiliki lemah maka akan membuat tingkat akuntabilitas semakin lemah. Sehingga nantinya lemah/kuat tahapan ini akan sangat memengaruhi tahapan lainnya.
3. *Accounting Practice*: Ini merupakan tahapan dimana sistem akuntansi harus bekerja seperti yang seharusnya. Pada tahapan ini sangat dipengaruhi oleh tahapan



sebelumnya yaitu *accounting infrastructure*.

4. *Accounting Culture*: Ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan budaya yang terjadi di suatu organisasi. Budaya ini sangat memengaruhi perilaku individu maupun kelompok suatu organisasi bekerja. Pada tahapan Pada tahapan ini juga sangat dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya yaitu *accounting infrastructure*. Terjadi sebuah hubungan antara *accounting Practice* dan *accounting culture*. Hubungan ini terjadi dikarenakan praktik akuntansi tidak hanya dapat memengaruhi hasil namun juga dapat memengaruhi perilaku suatu organisasi/budaya. Dan sebaliknya budaya akuntansi dalam suatu organisasi dapat memengaruhi praktik akuntansi.
5. *Budget Implementation/Performance*: Ini merupakan tahapan yang berkaitan mengenai implementasi dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan mengacu pada UU Nomor 24 tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat anggaran dan melaksanakannya. Sehingga peran *accountability infrastructure*, serta *accounting practice* dan *accounting culture* akan sangat memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
6. *Management of Public Expenditure*: Ini merupakan tahapan kebijakan yang dihasilkan untuk kepentingan publik. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir yang akan mengacu dari implementasi akuntabilitas yang telah diterapkan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh aparatur Pemerintah Desa adalah kompetensi dari aparatur Pemerintah Desa dalam pembuatan laporan keuangan. Kompetensi ini merupakan

hal yang penting mengingat dalam hal melaporkan laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan Pemandagri 113 Tahun 2004 sehingga jika kompetensi ini tidak dilihat maka dalam hal pembuatan laporan keuangan maka dalam hal akuntabilitas dapat dikatakan mengalami penurunan akuntabilitas atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, hal yang dapat disimpulkan bahwa terdapat pengembangan model akuntabilitas dari model yang telah dibuat oleh Iyoha dan Oyerinde (2009), yaitu penambahan aspek spiritual. Pada tahapan ini merupakan tahapan dimana struktur dasar atau tataran fundamental pembentukan karakter dari aparatur Pemerintah Desa sehingga nilai-nilai spiritual agar dalam melaporkan keuangan Desa sehingga tidak ada tekanan dalam melaporkan laporan keuangan sehingga ketika melaporkan keuangan Desa ada rasa keikhlasan karena dalam melaporkan keuangan Desa sehingga bentuk pertanggungjawaban kepada publik didasarkan atas rasa karena publik membutuhkan laporan keuangan tersebut.

Saran

Saran yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penelitian mengenai akuntabilitas dengan menambahkan aspek spiritual melalui pendekatan kuantitatif agar bias diuji mengenai dampak dari aspek spiritual dalam pelaporan keuangan desa serta akuntabilitas Desa.
- b. Perlu adanya bentuk pelatihan dan pembinaan agar kompetensi aparatur Pemerintah Desa semakin meningkat terutama dalam hal pembuatan laporan keuangan.
- c. Perlu adanya pembinaan mengenai aspek *accounting spiritual*, agar laporan keuangan yang dibuat tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan kewajiban tapi juga berperan sebagai bentuk



pertanggungjawaban kepada Tuhan sehingga akuntabilitas yang dihasilkan tidak serta merta kepada manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aksi-Corruption Forum (IACF) tahun 2010
- [2] Cheng,R.H., John H.E., Susan, C. Kattelus, Fall.(2002). *Educating government Financial Managers: University collaboration between business*
- [3] Grimmelikhuijsen, S. (2013). A good man but a bad wizard. About the limits and future Transparency of democratic governments. *Information Polity*, vol 17, pp 293–302.
- [4] Hartono, Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- [5] Hofstede, G., Hofstede, G.J. dan Minkov, Michael. 2005. *Cultures and organizations: Software of the mind*. New York: McGraw Hill
- [6] Iyoha , F.O. dan Oyerinde, D. 2009. Accounting infrastructure and accountability in the management of Public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting* vol 21 pp 361–373
- [7]
- [8] Jermias , Johnny dan Setiawan, Trisnawati. 2008. The moderating effects of hierarchy and control Systems on the relationship between budgetary participate on and performance. *The International Journal of Accounting* Vol 43 pp 68–292
- [9] Jorge,S.,MouraeSá,P.,Pattaro,A.F.,&Lour enço,R.P.(2011). Local government financial transparency in Portugal and Italy: A comparative exploratory study on its determinants. Paper presented at 13 *Biennial CIGAR Conference*, 9–10 June, Ghent, Belgium.
- [10] Kalbers, L. P., & Fogarty, T. J. (1995). Professionalism and It's Consequences: A Study of Internal Auditors. *A Journal of Practice and Theory*. Spring. Vol. 14. No.1.pp. 64-85
- [11] Kurtz, M. J., & Schrank , A. (2007). Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms, *The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, May 2007, pp. 538–554
- [12] Laswad,F.,Fisher,R.,&Oyelere,P.(2005). Determinants of voluntary Internet financial Reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* vol 24 pp 101–121
- [13] Leung, P. (2009). *The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management*. The Institute of Internal Auditors Inc. Research
- [14] Ludigdo.U. 2005. Pemahaman Strukturasi Atas Praktik Etika di Sebuah Kantor Akuntan Publik. Ringkasan Disertasi. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
- [15] Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja
- [16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
- [17] Scott,J.K. (2006). “E” the people: Do US municipal government websites support public involvement? *Public Administration Review*, 66 (3), 341–353.
- [18] Uddin,S.,&Hopper,T.(2001).A Bangladesh soap opera: Privatization, accounting and regimes of controlin a less developed country. *Accounting Organizations and Society*, vol 26, pp 643–672.
- [19] PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- [20] Ediwar, Jufri, Sahrul, N., Minawati, R., Irdawati, & Yurnalis. (2021). Creative Industry of the Making of Gandang Tambua Musical Instrument Based On Traditional Technology. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 3752–3764. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.05.259>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN